

## **Pelaksanaan Program Smart Transport Sekolah di Kota Mojokerto Tahun 2017 (*The Implementation of School Smart Transport Program in Mojokerto City in 2017*)**

Nia Mega Kurniasari, Ardiyanto, Hadi Makmur  
Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Jember  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [ardiyanto100@yahoo.com](mailto:ardiyanto100@yahoo.com)

### **Abstract**

*This study aims to describe the implementation of School Smart Transport Program in Mojokerto City in 2017. This descriptive study employed a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Then, the data were analyzed by using interactive analysis of Miles and Huberman which consisted of data reduction, data presentation, and drawing conclusion. To test the data validity, researchers used source and technique triangulations. The theory used to analyze the implementation of School Smart Transport Program was owned by Van Meter and Van Horn with six variables namely standard and policy target, resource, characteristics of implementing organization, communication between implementing organizations, communication between related organizations, implementing activities, and social, economic and political environments. Based on the findings, the implementation of School Smart Transport Program run in accordance with the established track or route, but the Mojo E-Transchool application was not optimally used by the community.*

**Keywords:** *implementation, program, and School Smart Transport*

### **Pendahuluan**

Sekolah merupakan tempat utama bagi masyarakat untuk mendapatkan atau memperoleh pendidikan yang terdiri dari berbagai jenjang, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan Perguruan Tinggi. Sekolah yang baik biasanya identik dengan kelengkapan adanya prasarana dan sarana atau fasilitas pelayanan yang ada sehingga mendukung kegiatan pembelajaran secara efektif. Namun, tidak semua sekolah mampu memberikan fasilitas pelayanan yang lengkap sesuai dengan tuntutan siswanya. Faktor tata letak atau keberadaan suatu sekolah juga menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan guna melihat atau menilai kelengkapan sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan yang dimiliki. Karena letak suatu sekolah merupakan penentu tidaknya sekolah tersebut dijangkau oleh masyarakat, apalagi jika letak sekolah tersebut jauh dari pusat kota atau trayek angkutan kendaraan umum.

Dalam memperhatikan dan mengantisipasi kebutuhan angkutan sekolah yang efektif dan efisien tersebut, maka pemerintah khususnya badan terkait

yakni Kementerian Perhubungan Darat memenuhi tuntutan masyarakat tersebut yang kemudian tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.967/AJ.202/DRJD/2007 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sekolah. Pada pasal 2 Bab I peraturan tersebut menjelaskan bahwa angkutan sekolah terdiri dari angkutan antarjemput anak sekolah, dan angkutan kota/pedesaan anak sekolah. Angkutan antarjemput anak sekolah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau dalam arti lembaga sekolah yang mengadakan atau menyediakan layanan transportasi angkutan sekolah tersebut dengan ijin Dinas Perhubungan setempat. Biaya layanan transportasi atau tarifnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antarpengguna jasa dengan penyelenggara angkutan antarjemput sekolah. Sedangkan angkutan perkotaan/perdesaan anak sekolah diselenggarakan oleh pemerintah daerah setempat sesuai dengan trayek yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum serta hanya beroperasi pada jam yang disesuaikan dengan keberangkatan dan kepulangan siswa. Untuk tarifnya ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dan harus lebih rendah

dari tarif angkutan umum yang berlaku di daerah tersebut, seperti halnya di Kota Mojokerto.

Kota Mojokerto memiliki Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2016 tentang Angkutan Sekolah Gratis. Pada pasal 1 ayat 13 Perwali tersebut, disebutkan bahwa Angkutan Sekolah Gratis adalah angkutan dalam trayek tetap dan teratur yang khusus melayani siswa sekolah. Angkutan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto sehingga siswa yang menggunakan layanan ini dilarang memberikan tips/bonus kepada sopir/pengemudi. Begitupun juga dengan pengemudi dilarang memungut tips/bonus dari penumpang/siswa. Angkutan Sekolah Gratis di Kota Mojokerto ini merupakan sebuah program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto yang di *launching* pada 14 Maret 2016. Namun, pada tahun 2017 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dinyatakan sudah tidak dalam satu kesatuan ikatan dinas yakni menjadi Dinas Perhubungan. Oleh karena itu program ASG mulai tahun 2017 merupakan program Dinas Perhubungan Kota Mojokerto. Adapun maksud dan tujuan adanya ASG (Angkutan Sekolah Gratis) di Kota Mojokerto yang tertuang dalam Perwali Nomor 13 Tahun 2016 yakni mendukung program wajib belajar, membantu mengurangi beban biaya pendidikan, menghindari penggunaan kendaraan bermotor oleh pengguna dibawah batas umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu syarat usia boleh mengendarai kendaraan bermotor minimal 17 Tahun, dan menyediakan ASG yang efektif dan efisien.

Pada akhir tahun 2016, Dinas Perhubungan mengembangkan program tersebut dengan menyesuaikan dengan visi dan misi Kota Mojokerto yang mewujudkan *Service City* yang kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi. Program ASG diteruskan menjadi Program *Smart Transport Sekolah*. Pasal 1 ayat 16 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 90 Tahun 2016 tentang “Program *Smart Transport Sekolah*” Kota Mojokerto menyebutkan bahwa *Smart Transport Sekolah* adalah suatu tata kelola sistem informasi terhadap layanan angkutan sekolah gratis dengan menggunakan Teknologi Informasi.

Perbedaan program ini dengan sebelumnya yakni pada pemanfaatan kemajuan teknologi yakni berupa aplikasi “*E-Transchool Mojo*” yang berguna untuk memantau dan melihat keberadaan bus sekolah yang kemudian dapat diketahui keberadaannya oleh siswa dan wali murid pengguna bus sekolah maupun pelaksana dan pemantau program. Program ini merupakan program pemerintah Kota Mojokerto yang menggunakan aplikasi berbasis android dan iOS yang ditujukan kepada penumpang juga merupakan hasil kerjasama dengan Perusahaan TI Gamatechno

di Yogyakarta. Aplikasi ini memiliki beberapa fungsi dasar, yaitu informasi trayek, informasi rute, *share* ke *social media*, dan *feedback*. Selain itu program ini merupakan program Angkutan Sekolah Gratis/Bus Sekolah yang memiliki aplikasi pertama yang ada di Jawa Timur. Hal tersebut yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Program *Smart Transport Sekolah*.

Saat ini terdapat 19 kendaraan yang sudah dioperasionalkan untuk memberikan layanan angkutan sekolah gratis yakni 13 kendaraan umum (Line) hasil dari kerjasama dengan pihak Organda Kota Mojokerto, 2 Mini Bus dari Kementerian Perhubungan, dan 4 Mobil yakni 3 Mobil Luxio pembelian dari APBD Kota Mojokerto dan 1 Mobil APV Hibah dari CSR Bank Jatim. Jam operasional program ini dibagi 2 yakni keberangkatan pagi dan keberangkatan siang. Keberangkatan pagi dimulai pukul 06.00 WIB dan keberangkatan siang dimulai pukul 14.00 WIB. Terdapat 8 trayek dalam pelaksanaan operasional Angkutan Sekolah Gratis (2018) yakni Trayek 01 (Kelurahan Wates), trayek 02 (Kelurahan Kedundung), Trayek 03 (Kelurahan Kranggan), Trayek 04 (Kelurahan Pulorejo), Trayek 05 (Kelurahan Surodinawan), Trayek 06 (Kelurahan Blooto), Trayek 07 (Kelurahan Gunung Gedangan),Trayek 08 (Kelurahan Randegan/Sekar Putih).

Latar belakang adanya program ASG menurut Robik Subagyo selaku Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto yakni selain tingginya angka kecelakaan lalu lintas pelajar di Kota Mojokerto yang tergolong cukup tinggi dari jumlah keseluruhan kecelakaan yang ada (hasil evaluasi *time series*) juga diikuti oleh tingginya angka pelanggaran lalu lintas di kawasan sekolah yakni terjadi sekitar 4000 pelanggaran per hari di kawasan sekolah Kota Mojokerto (Wawancara pada Agustus, 2018). Respon masyarakat Kota Mojokerto terhadap program ini dari awal tahun penyelenggaraan program dapat terbilang cukup baik atau antusias.

Namun sejalan dengan adanya pelayanan angkutan sekolah gratis pada saat ini serta berdasarkan hasil survey penumpang angkutan terhadap angkutan sekolah gratis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Mojokerto diketahui bahwa rata-rata *load factor* (faktor muat penumpang) pada seluruh trayek masih sangat rendah yaitu 50% serta waktu tunggu rata rata diatas 10 menit dan didalam beroperasi belum dilengkapi dengan *time table* yang handal. Selain itu, seperti tujuan semula diberikannya pelayanan angkutan sekolah gratis dimaksudkan untuk bisa memberikan pelayanan kepada siswa untuk melakukan perjalanan pergi dan pulang sekolah. Pada saat ini kapasitas tempat duduk yang disediakan untuk melayani berjumlah 288 tempat duduk dan saat ini masih dimanfaatkan 144 tempat duduk pada saat berangkat dan pulang sekolah. Oleh

karena itu target sasaran yang akan dicapai adalah sebanyak 144 siswa (2016). Selain itu adanya aplikasi *E-Transchool* Mojo apakah telah membantu keberhasilan program maupun pencapaian tujuan dan/atau sasaran program terhadap pengguna angkutan sekolah gratis (Data Evaluasi Program ASG terakhir sebelum dilanjutkan Program STS, 2016).

Berdasarkan uraian terkait berbagai permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji Pelaksanaan Program *Smart Transport* Sekolah di Kota Mojokerto Tahun 2017. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 4 trayek operasional yakni Trayek 06 (Kelurahan Blooto), Trayek 03 (Kelurahan Kranggan), Trayek 04 (Kelurahan Pulorejo), dan Trayek 08 (Kelurahan Randegan/Sekar Putih). Alasan peneliti memilih 4 trayek berdasarkan pada wilayah barat, selatan, utara dan timur. Selain itu diambilnya 4 trayek guna mempresentasikan keadaan nyata dalam pelaksanaan Program *Smart Transport* Sekolah di Kota Mojokerto. Wilayah barat diwakili oleh Trayek 06 (Kel. Blooto), wilayah selatan diwakili oleh Trayek 03 (Kel. Kranggan), wilayah Utara diwakili Trayek 04 (Kel. Pulorejo), dan wilayah timur diwakili oleh Trayek 08 (Kel. Randegan/Sekar Putih). Peneliti menganggap keterwakilan tersebut sudah mewakili pelaksanaan Program *Smart Transport* Sekolah di Kota Mojokerto. Selain itu peneliti juga melakukan observasi atau terjun lapang dengan ikut serta dalam angkutan sekolah gratis dan mengamati langsung aktivitas implementasi program terhadap sopir angkutan maupun pengguna angkutan.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang terfokus pada pelaksanaan Program *Smart Transport* Sekolah di Kota Mojokerto tahun 2017. Bog dan dan Taylor (1992) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan-ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa pengguna *Smart Transport* Sekolah dan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun. Sedangkan, Waktu penelitian yakni peneliti melaksanakan penelitian dimulai pada bulan Juli sampai Agustus 2018.

Metode pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi, dan dokumen. Sedangkan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive dengan jumlah 22 informan yang terdiri dari siswa sekolah, sopir, serta pegawai Dinas Perhubungan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:247), yaitu reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik menguji keabsahan data yang digunakan adalah ketekunan pengamatan, triangulasi, kecukupan referensial, dan pengecekan anggota.

### Hasil Penelitian

Analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori model implementasi Van Meter Van Horn. Dalam model implementasi tersebut terdapat enam variabel dalam mengukur implementasi kebijakan. Enam variabel tersebut yakni standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; karakteristik orga-nisasi pelaksana; komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; sikap para pelaksana; lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya akan dipaparkan secara rinci analisis data dengan menggunakan metode dan landasan teori yang dipilih berdasarkan variabel tersebut.

#### 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam Program *Smart Transport* Sekolah yakni beliau mengatakan, “iya tujuan dari adanya program STS ini ya utamanya untuk mengurangi angka kecelakaan pelajar dan membudayakan budaya tertib lalu lintas di kawasan sekolah terutamanya bagi pelajar itu sendiri”. Pelaksana operasional lapangan yakni sopir angkutan sekolah gratis juga diharapkan tau dan memahami tujuan adanya Program *Smart Transport* Sekolah. Bapak Bobby Trayek 06 Kelurahan Blooto mengatakan, “digae iku opo nek kecelakaan anak sekolah iku lho. kadang arek sekolah nek sepeda pancalan sing omong-omongan ndek dalam dampingan iku kan iso nggarai kecelakaan pelajar. nah iku ben iso diminimalisir nek jarene wong wong kantor ngunu”. Selain itu sopir Trayek 03 Kelurahan Kranggan Bapak Rahmadi mengatakan, “ada mbak tujuannya adanya angkutan gratis ini itu salah satunya ya mensukseskan program Mojokerto Service City itu, terus menekan angka kecelakaan pelajar dan macet, sama itu bisa membantu memudahkan orang tua dan murid (sambil menunjukkan catatan)”. Bapak Roy selaku sopir Trayek 08 Kelurahan Randegan/Sekar Putih juga mengatakan, “ya itu mbak tujuane ya supaya menekan angka kecelakaan pelajar itu utamanya”. Bapak Ahmadi selaku sopir Trayek 04 Kelurahan Pulorejo mengatakan, “utamane jarene Pak Robik iko yo menekan kecelakaan pelajar iku mbak”.

Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa variabel standar dan sasaran kebijakan dalam Program *Smart Transport* Sekolah terutama pada tujuan diadakannya program tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh pelaksana kebijakan baik itu dari pelaksana Dishub maupun pelaksana operasional lapangan (para sopir). Adanya Program *Smart Transport* Sekolah juga didasarkan atas standar dan

sasaran kebijakan di atasnya yakni dari Kementerian Perhubungan maupun Perwali Kota Mojokerto.

## 2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Program *Smart Transport* Sekolah tentu memiliki ketiga sumber daya tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Agustuti Rosyid selaku Kabid Angkutan, Sarana, dan Prasarana Dishub Kota Mojokerto mengatakan, “untuk anggaran program ini tidak semua pembiayaannya dari APBD mbak. yang dari kementerian ya bis aja mbak. yang mobil APV itu dapat hibah dari Bank Jatim sama APBD. dan untuk biaya semua nya selain itu tadi dari APBD termasuk gaji sopirnya”

## 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Dalam variabel ini memiliki indikator berupa prosedur-prosedur kerja standar (SOP=*Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi. Fragmentasi adalah kondisi akibat tekanan lingkungan birokrasi, termasuk lingkungan politik hingga konstitusi. Tidak ada kondisi tekanan akibat lingkungan birokrasi dalam pelaksanaan Program *Smart Transport* Sekolah dari awal hingga saat ini, semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun SOP program ini belum ada. Begitupun dengan pihak Organda yang selalu mengusahakan untuk mematuhi aturan dari Dinas Perhubungan yang diterapkan untuk program ini.

## 4. Komunikasi Antarorganisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Dalam variabel ini, agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan pelaksanaan ataupun melalui laporan keseharian atau bahkan evaluasi tiap bulan/tiap tahun. Program *Smart Transport* Sekolah bekerjasama dengan organisasi lain yakni organisasi IT

(Gamatekno di Yogyakarta) yang mengatur tentang aplikasi.

## 5. Sikap Para Pelaksana

Sikap penolakan atau penerimaan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Karena kebijakan publik biasanya bersifat *top-down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Dalam Program *Smart Transport* Sekolah merupakan program yang bersifat *top-down* berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat. Program *Smart Transport* Sekolah ini merupakan salah satu program pendukung visi Kota Mojokerto yakni, terwujudnya *Service City*. Namun Dinas Perhubungan tetap memiliki kewenangan terhadap berjalan tidaknya program ini apabila terdapat pergantian Walikota nantinya.

## 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Dalam hal ini yang dimaksud yakni lingkungan eksternal kebijakan publik yang mendukung atau menekan. Begitupun Program *Smart Transport* Sekolah, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Agustuti Rosyid berikut. Beliau mengatakan, “kalau dari segi sekolah ya, alhamdulillah. tapi kalau kondisi politik, tidak mengarah kesitu. tapi kalau memang untuk ada kaitannya dengan program Walikota ya memang. itu juga menjadi nilai plus untuk Kota Mojokerto karena kan belum semua kota menerapkan hal seperti ini.”

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Program *Smart Transport* Sekolah di Kota Mojokerto berdasarkan variabel model Van Meter Van Horn. Pada variabel standar dan sasaran kebijakan dikatakan terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur atau peraturan yang ada; variabel sumber daya manusia dari segi kerjasama maupun kedisiplinan sopir angkutan dikatakan baik meskipun kondisi perbedaan pintu terbuka dan tertutup di pintu samping antara kenaraan jenis mobil dan angkutan Line dapat mempengaruhi jumlah peminat program, sumber daya finansial dikatakan kurang jelas dan terperinci dalam tahun 2017 dan ada rincian yang janggal, sedangkan sumber daya waktu dikatakan dapat dimanfaatkan dengan baik meskipun keberlanjutan program masih belum dapat dipastikan dengan benar; variabel karakteristik organisasi pelaksana dalam Program

*Smart Transport* Sekolah dapat disimpulkan tidak terjadi fragmentasi meskipun SOP secara tertulis belum ada, hanya konsensus dan peraturan Walikota maupun *Grand Design* Program; variabel komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan disimpulkan terlaksana sesuai dengan aturan organisasi masing-masing dan konsensus kedua pihak; variabel sikap para pelaksana dalam Program STS ini menyesuaikan atau patuh terhadap produk hukum di atasnya atau bahkan organisasi lain seperti kebijakan zonasi dan *fullday* dari Dinas Pendidikan Kota Mojo-kerto serta Pihak Dishub maupun Organda siap menerima kritikan dan saran bahkan keluhan dari penumpang; variabel lingkungan sosialnya dikatakan masyarakat mendukung adanya program/kebijakan ini dan meskipun masyarakat Kota Mojokerto rata-rata telah mengikuti kemajuan teknologi namun target pemanfaatan aplikasi *E-transchool* Mojokerto belum tercapai, dalam lingkungan ekonomi masyarakat Kota Mojokerto terhadap program ini yakni ada yang tidak menggunakan dikarenakan perekonomiannya ada juga yang mengikuti angkutan sekolah gratis dikarenakan ekonomi masyarakat/keluarganya dibawah atau tidak mampu mengantarkan anaknya sekolah, sedangkan dalam Program STS ini tidak terpengaruh dengan kondisi politik yang ada di Kota Mojokerto.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sajikan dari hasil analisis penelitian, peneliti dapat memberikaan saran yakni Dinas Perhubungan Kota Mojokerto sebaiknya segera merancang atau merumuskan *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk Program *Smart Transport* Sekolah guna lebih memperkuat payung/produk hukum program. Selain itu, Perlu adanya sosialisasi yang lebih rutin kepada pelajar dan masyarakat guna mempromosikan adanya angkutan gratis ini agar jumlah penumpang atau pengguna program dalam tiap trayek tidak terbilang mengalami perbedaan yang signifikan serta mempromosikan kembali mengenai aplikasi Program *Smart Transport* Sekolah.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Abidin, Z. Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2006). *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung bekerja sama dengan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Bandur, A. 2016. *Penelitian Kualitatif (Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Cresswel, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hamdi, M. 2014. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, J. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mutiarin, D. dan A. Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan Etika Kebijaka, Kimia Kebijakan)*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Purwanto, E. Agus, dan D. R. Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Raco, J.R. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Satori, D. dan A. Komariah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setyodarmodjo, S. 2003. *Publik Policy (Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sore, Udin B dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makasar: CV Sah Media.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi dan Basori. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wahab, Abdul dan Solichin. 1998. *Analisis kebijakan publik: teori dan aplikasinya*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik (Teori&Proses)*. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).

#### Jurnal Ilmiah

- Kusuma, O. W. Ardhya. 2015. *Evaluasi Program Bus Sekolah di Kota Surabaya*. Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 3, No. 2, 357-363.
- Arifin, M. Z., dan A. Wicaksono dkk. 2016. *Evaluasi Kinerja Angkutan Sekolah Gartis Di Kota Blitar*. Rekayasa Sipil, Vol. 10, No. 01, 33-40.

### **Lembaga**

Badan Pusat Statistik. 2017. *Kota Mojokerto Dalam Angka 2017*. Kota Mojokerto: BPS Kota Mojokerto.

Universitas Jember, 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*.Jember: Jember University Press.

### **Produk Hukum**

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.967/AJ.202/DRJD/2007. *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sekolah*. 29 Maret 2007. Jakarta: Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2016. *Angkutan Sekolah Gratis Di Kota Mojokerto*. 29 Februari 2016. Mojokerto: Pemerintah Kota Mojokerto.

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 90 Tahun 2016. *Program Smart Transport Sekolah*. 28 November 2016. Mojokerto: Pemerintah Kota Mojokerto.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. 12 Agustus 2011. Jakarta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

### **Skripsi**

Ferdiansyah, Viko. 2018. *Efektivitas Pelayanan Angkutan Kota Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Di Kabupaten Lumajang*. Skripsi. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

### **Website**

<http://new.mojokertokota.go.id/home> (diakses pada tanggal 24 September 2018).

[www.dishub.mojokertokota.go.id](http://www.dishub.mojokertokota.go.id) (diakses pada tanggal 24 September 2018).

<http://digilib.unila.ac.id/9618/18/BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 11 oktober 2018).

<http://eprints.umm.ac.id/35898/3/jiptummpp-gdl-aanwidiast-47496-3-babii.pdf> (diakses pada tanggal 11 oktober 2018).